

UPAYA CLEAN CLOTHES CAMPAIGN MEMBANTU TUNTUTAN PEKERJA PT JABA GARMINDO TERHADAP UNIQLO TAHUN 2015-2020

Leticia Carla Dos Reis Henriques¹⁾, D.W. Wiwik Dharmasih²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

^(1,2,3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: mgimival02@gmail.com¹⁾, wiwikd@unud.ac.id²⁾, kawitriresen@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

This research aims to analyze the endeavors made by (CCC) in helping pt Jaba Garmindo's labor demands against Uniqlo in 2015-2020. This research is qualitative descriptive research using the concept of human rights and transnational social movements. Data is obtained from various scientific journals, books, news, and articles related to the object being considered. The findings show that the efforts made by the Clean Clothes Campaign (CCC) are campaigning for changes in working conditions to be more humanist for workers in the fast fashion industry by voicing various human rights infringements that afflict workers on the international scene. In taking action Uniqlo will join many other global brands including H&M, Nike, Adidas, and Walmart that have legally taken over responsibility and provided workers with unpaid severance after bankruptcy and factory closures.

Keywords: Clean Clothes Campaign (CCC), UNIQLO, Human Rights

1 PENDAHULUAN

Menurut Turner (2010) organisasi internasional non-pemerintah adalah bagian penting dari masyarakat sipil global dan memainkan peran penting dalam urusan dunia. Organisasi internasional non-pemerintah berinteraksi dengan aktor internasional lainnya, seperti perusahaan transnasional (*Transnational Corporation/ TNC*), organisasi pemerintah internasional (*International Governmental Organization/NGO*) dan negara berdaulat. Salah satu fungsi organisasi internasional non-pemerintah adalah melobi pembuat keputusan politik (Turner, 2010). Salah satunya adalah organisasi non-pemerintah yang terdiri

dari serikat buruh dan industri garmen seperti CCC.

Dikutip dari situsnya (CCC, 2020) adalah organisasi non-pemerintah yang terdiri dari serikat buruh dan industri garmen. Tujuan berdirinya *Clean Clothes Campaign* adalah untuk meningkatkan kondisi kerja dan memberdayakan pekerja di industri garmen dan pakaian (CCC, 2020). Sejak 1989, *Clean Clothes Campaign* (2020) telah bekerja untuk memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja dihormati. *Clean Clothes Campaign* (2020) mendidik dan memobilisasi konsumen, melobi perusahaan dan pemerintah, dan menawarkan dukungan solidaritas langsung kepada pekerja ketika mereka memperjuangkan hak-hak mereka dan menuntut kondisi kerja yang lebih baik.

Clean Clothes Campaign (2020) menyatukan serikat pekerja dan LSM yang mencakup berbagai perspektif dan kepentingan, seperti hak-hak perempuan, advokasi konsumen dan pengurangan kemiskinan.

2 KAJIAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan dua kajian pustaka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Kajian pustaka pertama yang Peneliti gunakan adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh Melanie Kryts pada tahun 2012. Dalam tulisannya, Kryts (2012) menjelaskan bahwa koalisi didefinisikan sebagai kerja sama terkoordinasi dari kekuatan politik yang independen tetapi konvergen. Definisi koalisi yang sedemikian luas memungkinkan beberapa motif pembentukan koalisi seperti kepentingan strategis serta norma dan nilai bersama atau kepercayaan bersama. Koalisi serikat pekerja dan LSM bisa beragam. Dalam penelitiannya, Kryst (2012) menyebutkan koalisi serikat pekerja dan LSM yang mencoba untuk mempertahankan standar kerja dalam ekonomi global telah meningkat sejak 1990-an.

Studi kasus *Clean Clothes Campaign* di Jerman adalah sebuah jaringan serikat pekerja dan LSM yang memperjuangkan standar tenaga kerja di industri garmen sejak tahun 1998. Hal ini menunjukkan kemungkinan pengembangan koalisi dalam konteks secara global untuk regulasi perburuhan. Pada saat ini, *Clean Clothes Campaign* di Jerman menunjukkan kerja sama yang stabil dan

intensif. Tulisan Kryst (2012) menyajikan bagaimana serikat pekerja dan LSM membangun kerja sama yang intensif. Tujuan *Clean Clothes Campaign* di Jerman pada awalnya adalah untuk menetapkan kode etik perusahaan tetapi akhirnya menyatakan konsumerisme politik sebagai instrumen yang tepat untuk mengamankan sistem standar pekerja. Dengan demikian, koalisi serikat atau LSM menganggap tata kelola ketenagakerjaan swasta sebagai tambahan untuk peraturan kebijakan publik.

Pada awalnya, *Clean Clothes Campaign* di Jerman melakukan aksi gerakan seperti aksi protes dengan tujuan menetapkan agenda. Sekarang, tindakan-tindakan ini tetap merupakan kegiatan penting bagi koalisi, tetapi negosiasi dan kolaborasi perusahaan dengan perusahaan dan pemerintah swasta menjadi lebih relevan. Tindakan *Clean Clothes Campaign* di Jerman lebih mengarah ke perusahaan dan juga aktor negara. Upaya *Clean Clothes Campaign* di Jerman untuk mengamankan standar perburuhan adalah salah satu dari banyak inisiatif yang berhubungan dengan instrumen regulasi perusahaan-perusahaan transnasional yang berorientasi ke ranah publik.

Oleh karena itu, ada berbagai strategi bagi aktor non-negara untuk mengintegrasikan standar tenaga kerja dan lingkungan ke dalam ekonomi global. Tulisan Kryst (2012) menunjukkan perlu adanya perhatian lebih lanjut pada aspek pembelajaran

dari aktor non-negara untuk memahami bagaimana serikat pekerja dan LSM mengambil keuntungan dari berbagai strategi dalam perjuangan tentang peraturan perburuhan transnasional.

Kajian pustaka kedua yang Peneliti gunakan adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh Niklas Egels-Zanden dan Peter Hyllman pada tahun 2006. Tulisan Egels dan Hyllman (2006) menjelaskan bahwa kegiatan LSM dipandang sebagai pengganti kegiatan serikat. Argumen yang mendasari pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa hak dan kepentingan pekerja hanya dapat dilindungi melalui perundingan bersama dan lembaga hukum, bukan oleh hak yang secara sepihak diperluas ke pekerja oleh TNC.

Pandangan kedua berpendapat bahwa kegiatan LSM melengkapi kegiatan serikat. Sudut pandang ini menyatakan bahwa serikat pekerja dan LSM dapat mengarahkan kekuatan gabungan mereka atas TNC dengan bekerja sama. Dengan cara ini, keterlibatan LSM berkontribusi untuk meningkatkan hak-hak pekerja untuk memperkuat pengaruh serikat pekerja. Dengan menggunakan dua pandangan ini Egels dan Hyllman (2006) berpendapat bahwa hubungan antara serikat pekerja dan LSM dapat dianalisis sebagai masalah koordinasi. Ada indikasi bahwa serikat pekerja cenderung memilih konflik sebagai strategi tetap mereka, sementara LSM di sisi lain cenderung memilih koordinasi sebagai strategi mereka. Secara keseluruhan temuan

mengenai kecenderungan serikat pekerja dan LSM untuk memilih strategi koordinasi atau konflik mengkarakterisasi serikat pekerja sebagai memilih strategi konflik dan LSM strategi koordinasi. Ada dua asumsi: pertama, serikat pekerja dan LSM yang aktif di bidang hak-hak pekerja memiliki tujuan yang sama yaitu memengaruhi TNC untuk meningkatkan tanggung jawab mereka atas hak-hak pekerja di pabrik pemasok mereka. Kedua, serikat pekerja dan LSM samasama efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

3 METODELOGI

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengambil data secara rinci dan dapat diartikan sebagai metode yang tidak melakukan perhitungan apapun, meskipun menggunakan data numerik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif (Istiqomah, 2014: 2326). Metodologi kualitatif ditafsirkan oleh Bogdan & Taylor (Moleong, 2002 & Istiqomah, 2014: 24) sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa tulisan atau lisan orang dan perilaku yang dapat dikenali. Survei ini merupakan bagian dari survei kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh peneliti dari kumpulan data yang diperlukan untuk penelitian berupa referensi dan literatur seperti laporan penelitian, makalah, jurnal dan buku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perusahaan PT Jaba Garmino.

PT Jaba Garmino adalah perusahaan tekstil yang berbasis di Chikupa dan Majalengka. Oktober 2012, Grup Ritel Cepat menunjuk PT Jaba Garmino sebagai salah satu pemasok untuk merek Uniqlo. Quick Retailing Group menunjuk PT Jaba Garmino sebagai salah satu pabrik pemasok untuk merek Uniqlo dari bulan Oktober 2012 hingga bulan Oktober 2014. Setelah itu, PT Jaba Garmino membeli mesin baru dan melakukan investasi. Djoni Gunawan, presiden direktur PT Jaba Garmino, percaya bahwa karena banyaknya pesanan dari UNIQLO, kami perlu menambah mesin baru untuk memberikan layanan terbaik. PT Jaba Garmino juga menetapkan tujuan yang tinggi bagi karyawannya. Warni, karyawan PT Jaba Garmino, Karyawan mengatakan mereka bekerja lembur hampir setiap hari untuk memproses pesanan dari Uniqlo. Warni juga mengatakan bahwa hal ini memberikan waktu bagi staf untuk beristirahat (Putri, 2019).

Pada bulan April 2015, PT Jaba Garmino dinyatakan pailit dan mengalami kebangkrutan. Hal itu dikarenakan permasalahan keterlambatan pengiriman yang berkualitas dan permanen. FAST RETAILING Group berkonsultasi dengan PT Jaba Garmino pada awal tahun 2014

untuk mengatasi situasi tersebut, namun PT Jaba Garmino tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karenanya, *Fast Retailing Group* menyatakan tidak dapat lagi mempertahankan hubungan bisnisnya dengan PT Jaba Garmino pada bulan Oktober 2014. PT Jaba Garmino melakukan penutupan pabrik dan tidak membayarkan upah kepada 4.000 orang karyawannya. Sejak itu, beberapa LSM internasional mengkampanyekan UNIQLO untuk memberikan kompensasi finansial kepada mantan karyawan PT Jaba Garmino

Pada bulan Juli 2017 dan November 2018, *Fast Retailing Group* melakukan pertemuan dengan perwakilan serikat pekerja dari PT Jaba Garmino di Jakarta, Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut dirahasiakan, namun *Fast Retailing Group* mengkonfirmasi rencana untuk melanjutkan pembahasan dengan perwakilan dari serikat pekerja untuk membantu memfasilitasi kembali lapangan pekerjaan bagi mantan pekerja PT Jaba Garmino. Tahun 2019, dua mantan pekerja PT Jaba Garmino melakukan protes di depan gerai *Uniqlo* yang baru dibuka di Kopenhagen, Denmark. Warni Napitupulu dan Tedy Senadi Putra menuntut Uniqlo untuk membayarkan upah mereka.

4.2 UNIQLO

UNIQLO adalah perusahaan perencanaan, manufaktur, dan penjualan pakaian kasual Jepang.

Toko pakaian kasual merek UNIQLO dibuka. Kantor pusat UNIQLO terletak di Sayama, Kota Yamaguchi, Prefektur Yamaguchi. Namun, fungsi manajemen utama telah diambil alih dari kantor Tokyo di Midtown Tower, Akasaka, Minato-ku, Tokyo. UNIQLO adalah anak perusahaan dari FAST RETAILING. Nama UNIQLO berasal dari nama toko pertama Tadashi Yanai yang dibuka pada tahun di Kota Hiroshima, Prefektur Hiroshima pada tanggal 2 Juni 1984., bernama "Unique Closing Warehouse." Konsep tokonya adalah "satu gudang besar yang selalu dapat Anda pilih". Ide itu muncul saat Yanai mengunjungi Amerika. Dia pergi ke koperasi perguruan tinggi yang penuh dengan remaja yang menjual pakaian kasual murah seperti pembeli majalah. UNIQLO menggambarkan model bisnisnya sebagai SPA (pengecer yang mengkhususkan diri dalam pakaian merek sendiri) atau pengecer yang mengkhususkan diri dalam pakaian merek sendiri.

Semua fase bisnis, mulai dari desain hingga manufaktur dan ritel, dikelola oleh perusahaan ini. Strategi inti dari model bisnis perusahaan adalah menempatkan pesanan massal untuk setiap produk.

4.3 PELANGGARAN ETIKA YANG DILAKUKAN UNIQLO

UNIQLO telah melakukan pelanggaran etika, pemutusan kerjasama sepihak dengan PT. Jaba

Garmino, April 2015 PT. Java Garmino dinyatakan bangkrut dan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Uniqlo mengumumkan dalam pernyataan dari Clean Clothes belum membayar uang pesangon US\$ 5,5 juta atau Rp 77 miliar.

Selain itu, UNIQLO telah melanggar etika perusahaan seperti pembuangan sisa produksi yang dibuang sembarangan, pelanggaran yang merusak lingkungan seperti gas buang yang menyebabkan polusi udara, dan pemutusan kontrak secara sepihak dengan pekerja. Gaji karyawan yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja.

4.4 Tuntutan Buruh

Pada tanggal 2 dan 7 April 2019, *Clean Clothes Campaign* membawa dua buruh asal Indonesia untuk melakukan demonstrasi di Denmark (Putri, 2019). Sebelum melakukan demonstrasi di Denmark, dua buruh tersebut telah terlebih dahulu melakukan aksinya di Tokyo pada tahun 2018 (Putri, 2019). Setelah serangkaian kampanye, Uniqlo merespon tindakan tersebut dengan menjauh dari proses mediasi dan menolak untuk membuat kesepakatan dengan para pekerja. Karena aksi yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil maka mereka memutuskan untuk kembali melakukan tindakan dan demonstrasi kembali di Denmark.

4.5 Clean Clothes Campaign (CCC)

Clean Clothing Campaign (CCC) adalah organisasi internasional yang mengkampanyekan hak-hak pekerja tekstil dan industri pakaian olahraga. Di situs webnya, Kampanye Pakaian Bersih mengungkapkan bahwa masalah dimulai pada akhir tahun 2014 ketika UNIQLO dan pedagang grosir lainnya menarik pesanan dari PT Jaba Garmino di Bekasi, Indonesia. Akibat hal tersebut, pada April tahun 2015, PT Jaba Garmino jatuh bangkrut dan mengalami pailit serta banyak anggota pekerja yang kehilangan mata pencaharian mereka. Clean Clothes Campaign juga menyebutkan bahwa Uniqlo tidak membayarkan upah pekerja sebesar USD 5,5 juta atau setara dengan Rp 77 miliar. Workers Rights Consortium (WRC) (2015) melaporkan bahwa pekerja PT Jaba Garmino Pelanggaran terhadap ketentuan kontrak kerja, pemecatan pekerja hamil tanpa alasan yang jelas, upah lembur, kegagalan menyediakan tempat kerja yang sehat dan aman, dan kegiatan serikat pekerja perusahaan Banding kepada perusahaan.

Konsorsium Hak Pekerja (WRC) telah mengusulkan agar banyak mitra PT Jaba Garmino, seperti Uniqlo, membantu membayar upah pekerja, bahkan jika itu bukan penyebab kebangkrutan. Konsorsium Riggs Pekerja (WRC) telah menemukan bahwa UNIQLO tidak dapat mencegah kasus upah yang tidak adil bagi

pekerja dan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip keberlanjutan internal UNIQLO.

Kampanye Pakaian Bersih (CCC) telah meluncurkan kampanye Pembayaran UNIQLO. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong berbagai perusahaan untuk menunda kerjasamanya dengan UNIQLO sampai mereka selesai membayar gaji mantan pemasok mereka.

4.6 Upaya yang dilakukan Clean Clothes Campaign

Uniqlo dirasa tidak menjalankan sustainability report (SR) yang telah ditetapkannya. Secara garis besar, apa yang terjadi pada karyawan PT Jaba Garmino, tidak sesuai dengan SR yang telah dibuat oleh Uniqlo. industri garmen, merilis bahwa Uniqlo telah melanggar kebijakan etika bisnis yang dapat dilihat dari :

- 1. Melanggar Sustainability Report*
- 2. Memutuskan hubungan kerja terhadap PT. Jaba Garmino secara sepihak*
- 3. Tidak membayar hak buruh yang berupa gaji senilai 5,5 juta USD*

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan:

- 1. Melakukan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan serta anggota Fast Retailing yang menangani masalah tersebut*

2. Memimpin diskusi dengan kepentingan pemilik tentang bagaimana melindungi pekerja industri dari kasus serupa di masa depan
3. Mengadakan pertemuan dengan para buruh
4. Memfasilitasi para mantan buruh PT Jaba Garmino untuk mendapatkan pekerjaan (18 Januari 2018)
5. Menawarkan untuk bekerja dengan pihak-pihak terkait untuk dapat memfasilitasi kembali Lapangan pekerjaan bagi pekerja yang masih menganggur (30 November 2018)

Solusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang dituntut oleh serikat pekerja melalui *Clean Clothes Campaign* adalah:

1. Memperjelas status buruh sebelum melakukan PHK
2. Ketika perusahaan supplier mengalami pailit seharusnya pihak *fast retailing* Uniqlo melakukan pencegahan kasus ketidakadilan upah pekerja dan memperjelas prinsip keberlanjutan kerja sama
3. Memberikan pesangon kepada buruh yang telah di PHK
4. Memberikan upah yang belum dibayarkan kepada para buruh
5. Menjalin hubungan yang harmonis dengan para perusahaan retailing namun juga dengan para buruh

6. Mempertegas kontrak kerja terhadap pihak-pihak yang melakukan kerja sama agar masalah financial seperti ini tidak terulang kembali

4.7 Solusi yang Dilakukan oleh Perusahaan UNIQLO

UNIQLO telah memungkinkan pekerja pabrik untuk memberikan kerjasama dengan pemangku kepentingan. Selain itu, FAST RETAILING mengaku telah berdiskusi Kami berdiskusi dengan pemangku kepentingan industri garmen dan garmen bagaimana melindungi pekerja industri dari kasus serupa di masa depan. Dalam perkembangannya, FAST RETAILING mengaku telah bertemu langsung dengan 4.444 pengurus serikat pekerja di Javagermind di Jakarta pada Juli 2017 dan November 2018. Namun, kedua belah pihak enggan untuk berbagi hasil kesepakatan. Solusi yang dilakukan oleh perusahaan Uniqlo sebagai berikut:

1. Memperjelas status buruh sebelum melakukan PHK
2. Ketika perusahaan supplier mengalami mipailit seharusnya pihak fast retailing *Uniqlo* melakukan pencegahan kasus ketidakadilan upah pekerja dan memperjelas prinsip keberlanjutan kerja sama
3. Memberikan pesangon kepada buruh yang telah di PHK
4. Memberikan upah yang belum dibayarkan kepada para buruh

5. Menjalin hubungan yang harmonis dengan para perusahaan retailing namun juga dengan para buruh
6. Mempertegas kontrak kerja terhadap pihak-pihak yang melakukan kerja sama agar masalah financial seperti ini tidak terulang kembali
7. Jika perusahaan pailit, perusahaan akan berusaha memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang lebih baik kepada pekerja atau pekerja.

4.8 Faktor Pendorong Gerakan *Clean Clothes Campaign*

PT Jaba Garmino adalah perusahaan tekstil yang menangani berbagai pakaian olahraga yang berbasis di Chikupa dan Majalengka, Indonesia. PT Jaba Garmino sendiri yang mengolah dan mengelola garmen dari perusahaan tekstil S. Oliver, Roxy dan H&M. Pada Oktober 2012,

FAST RETAILING Group telah menominasikan PT Jaba Garmino sebagai pemasok dengan merek UNIQLO. Dengan cara ini, PT Jaba Garmino membeli mesin baru dan melakukan beberapa investasi. Djoni Gunawan, presiden direktur PT Jaba Garmino, percaya bahwa karena banyaknya pesanan dari UNIQLO, kami perlu menambah mesin baru untuk memberikan layanan terbaik. PT Jaba Garmino menetapkan tujuan yang tinggi tidak hanya untuk mesin, tetapi juga untuk karyawan. Warni, pekerja di PT Jaba Garmino, mengatakan 4.444 pekerja bekerja lembur hampir setiap hari untuk

memproses pesanan dari Uniqlo. Buaya tersebut juga dikatakan menyebabkan dan menyita waktu istirahat pekerja (Putri, 2019).

Konsorsium Hak Pekerja (WRC) telah mengusulkan agar banyak mitra PT Jaba Garmino membantu pekerja membayar upah mereka, meskipun mereka bukan penyebab kebangkrutan. WRC berkewajiban membantu pekerja karena banyak perusahaan, termasuk UNIQLO, yang tergabung atau menjadi bagian dari serikat pekerja Hal ini juga mengutamakan prinsip keadilan dalam pembayaran upah kepada karyawan dari pihak pemasok. Dalam hal ini, WRC menemukan bahwa UNIQLO tidak dapat melakukan proses pencegahan untuk menghindari kasus upah yang tidak adil bagi pekerja. UNIQLO juga dianggap tidak mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Perusahaan induk UNIQLO, Fast Retailing, mengatakan telah bertemu dengan perwakilan mantan karyawan Java Garmino dan membuat beberapa kesepakatan. Namun, perusahaan memutuskan untuk merahasiakan perjanjian ini. Pertemuan itu digelar tak lama setelah dua mantan pekerja Java Garmino, Warni Napitupuru dan Teddy Senadi Putra, berdemonstrasi di toko UNIQLO di Tokyo menuntut pembayaran upah.

Konferensi ini juga merupakan hasil dari kampanye PayUp UNIQLO yang diprakarsai oleh kampanye garmen atau

garmen campaign, sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang mendukung sektor garmen dan proses advokasi pekerja di industri garmen. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong berbagai perusahaan untuk menunda kerjasamanya dengan UNIQLO agar dapat menyelesaikan pembayaran gaji karyawan yang merupakan mantan pemasok UNIQLO.

4.9 Tindakan yang Dilakukan oleh Perusahaan UNIQLO

- 1 Melakukan pertemuan dihadiri oleh perwakilan serta anggota Fast Retailing yang menangani masalah ini
- 2 Diskusikan dengan pemangku kepentingan di seluruh industri pakaian jadi bagaimana melindungi pekerja di industri yang terkena dampak dari insiden serupa di masa depan.
- 3 Mengadakan pertemuan dengan para buruh
- 4 Memfasilitasi para mantan pekerja PT Jaba Garmino untuk memperoleh pekerjaan (18 Januari 2018)
- 5 Tawarkan untuk bekerja dengan pemangku kepentingan untuk membantu para penganggur kembali bekerja (30 November 2018).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah internasional dalam membantu menyuarkan tuntutan buruh adalah dengan melakukan kampanye. *Clean*

Clothes Campaign (CCC) dalam membantu tuntutan buruh PT Jaba Garmino terhadap *Uniqlo* melakukan kampanye PayUp Uniqlo.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Budiarti, I. (2008, 05). Serikat Pekerja. Retrieved 08 16, 2020, From [Toolsfortransformation.Net](https://toolsfortransformation.net): Campaign, C. C. (2020). Jaba Garmino, Indonesia. Retrieved 08 18, 2020, From [Cleanclothes-Ea.Org](https://cleanclothes-ea.org):[https://Cleanclothes-Ea.Org/Content/Jaba-Garmino](https://cleanclothes-ea.org/content/jaba-garmino)
- Campaign, C. C. (2020). Retrieved From [https://Cleanclothes.Org/About](https://cleanclothes.org/about)
- Cowgill, M., & Huynh, P. 2016. Weak minimum wage compliance in Asia's garment industry. Bangkok: ILO Cowgill, M., & Huynh, P. 2016. Weak minimum wage compliance in Asia's garment industry. Bangkok
- DR.H. Gunarto, S. S. (2012, 12). Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Retrieved 08 16, 2020 Retrieved 07 15, 2020, From [Gupea.Ub.Gu.Se: https://Gupea.Ub.Gu.Se/Bitstream/2077/18842/1/Gupea_2077_1884_2_1.P](https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18842/1/Gupea_2077_1884_2_1.P)
- <http://www.uniqlo.com/id/corp/pressreleases/2019/04/mengenai-pt-jaba-garmino-mindmant.htm>
- <https://goodonyou.eco/how-ethical-is-uniqlo/https://m.suara.com/lifestyle/2019/04/06/170504/dituduh-belum-bayar-upah-eks-pekerja-uniqlo-indonesia-buka-suara>
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190409120204-92384591/kronologiuniqlo-soal-tuntutan-upah-buruh-di-indonesia>
<https://www.fastretailing.com/eng/sustainability/news/1811301101.html>
- Rangga Naviul Wafi, 2019. Memaknai Perjuangan Keras : Buruh Uniqlo. Indoprogress.com

Ririen Astria, 2010, "*Kinerja NGO*".
Universitas Sumatera Utara,
Sumatera Utara

Silmia, P. (2019, 04
05).*Penjahit Indonesia
Demo Uniqlo Jepang Hingga Den
mark*

Karena Belum Dibayar. Retrieved 05 10,
2020, From Wolipop.Detik.Com:

[https://Wolipop.Detik.Com/Fashion-
News/D-
4498227/PenjahitIndonesia-Demo-
Uniqlo-Jepang-Hingga-Denmark-
Karena-Belum-Dibayar](https://Wolipop.Detik.Com/Fashion-News/D-4498227/PenjahitIndonesia-Demo-Uniqlo-Jepang-Hingga-Denmark-Karena-Belum-Dibayar)

Soemarno,S.M.
(2011).*Direktori Organisasi
Internasional Non-
Pemerintah (Oinp) Di
Indonesia*. Jl. Taman Pejambon N
o. 6, Jakarta 10110

Retrieved 5 10, 2020, From
[https://Escholarship.Org/Uc/Item/9
7p470sxwaspada.co.http://waspad
a.co.id/ragam/tak-bayar- gaji-
karyawan-ini- klarifikasi-unit](https://Escholarship.Org/Uc/Item/97p470sxwaspada.co.http://waspada.co.id/ragam/tak-bayar-gaji-karyawan-ini-klarifikasi-unit).